

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Angelina¹, Jesica Handoko²

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia

Chat.debora@gmail.com; jesica@ukwms.ac.id

ABSTRACT

This study aims to empirically prove the influence of institutional ownership, audit committees, and environmental performance on the disclosure of carbon emissions in manufacturing companies. To measure the extent of carbon emissions disclosure in each company, a checklist has been developed based on a request sheet for information provided by the carbon emissions disclosure project (CDP). This type of research is classified in quantitative research with hypothesis testing. The type of data used is quantitative and qualitative data in the form of annual reports obtained from www.idx.co.id. The population in this study was a manufacturing company registered in IDX for 4 consecutive years, namely from 2017 to 2020. While the research sample was determined by purposive sampling method with a total of 148 samples were obtained. The results of this study showed that institutional ownership and audit committees variables have a positive effect on the disclosure of carbon emissions. Environmental performance variables negatively affect the disclosure of carbon emissions.

Keywords: Institutional ownership, audit committees, environmental performance, carbon emission disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur. Untuk mengukur seluas apa pengungkapan emisi karbon pada tiap perusahaan, digunakan checklist yang telah dikembangkan berdasarkan lembar permintaan informasi yang diberikan oleh proyek pengungkapan emisi karbon (CDP). Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 4 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling, total 148 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Variabel kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kata kunci: *Institutional ownership, audit committees, environmental performance, carbon emission disclosure*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan lingkungan dan menjadi topik yang cukup penting di berbagai negara adalah perubahan iklim atau pemanasan global. Sulit untuk mengantisipasi ancaman bisnis yang dikarenakan perubahan iklim (Marsh and McLennan Companies, 2018). Indonesia sendiri telah menduduki urutan ke 10 pada negara yang memicu banyaknya emisi karbon di dunia tahun 2018. Sebanyak 0,61 GT atas emisi karbon dioksida telah diproduksi oleh Indonesia tahun 2018 (Union of Concerned Scientists, 2020).

Beberapa negara mulai memprihatinkan kondisi lingkungannya dikarenakan pemanasan global tersebut dan berupaya untuk mencari solusi atas melambungnya emisi karbon dalam rangka menangani perubahan iklim. Laksani, Andesto, dan Kirana (2020) menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon masih dalam tahap pengungkapan secara sukarela. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan pengelolaan emisi karbon diduga akan menciptakan citra positif bagi *stakeholders* karena mereka akan beranggapan bahwa perusahaan lebih konsisten terhadap perannya baik dalam aspek sosial maupun lingkungan. Penelitian ini membahas tentang pengungkapan emisi karbon sebagai kontribusi atas upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, yaitu mekanisme *cooparate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional dan komite audit serta kinerja lingkungan (Amaliyah dan Solikhah, 2019; Saptiwi, 2019; Astari, Saraswati, dan Purwanti, 2020; Apriliana, Ermaya, dan Septyan, 2019). Pemilihan variabel independen yang diteliti dikarenakan masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa norma dan kontrak sosial sangatlah penting dengan tujuan memperoleh legalitas yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Kontrak sosial ini memastikan suatu organisasi beroperasi dalam batasan dan norma, serta sesuai dengan harapan masyarakat (Fernando dan Lawrence, 2014). Legalitas berarti dalam upaya menjalankan kegiatan operasi perusahaan, diperlukan dukungan baik dari negara maupun masyarakat. Terciptanya kesinambungan antara perusahaan dengan keberadaan akan konsep yang muncul di lingkungan masyarakat menyebabkan timbulnya legitimasi

suatu perusahaan (Deegan, Rankin, dan Tobin, 2002). Ketidaksesuaian antara keberadaan perusahaan dengan eksistensi sistem nilai dapat mengancam legitimasi suatu perusahaan. Dowling dan Preffer (1975:122, dalam Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa munculnya ancaman terhadap legitimasi perusahaan disebabkan oleh ketidakselarasan baik secara aktual maupun potensial terhadap norma dan kontrak sosial yang berlaku. Adanya teori legitimasi memberikan pandangan akan peraturan yang harus ditaati perusahaan meliputi aktivitas operasi perusahaan yang diterima masyarakat untuk menghindari perselisihan baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat aktivitas perusahaan berjalan.

Teori legitimasi dipakai dalam menguraikan serta menjelaskan tujuan perusahaan melakukan pengungkapan secara sukarela. Pengungkapan ini menambah citra positif perusahaan di mata masyarakat yang berarti masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas suatu perusahaan dalam lingkungannya. Hal ini didukung oleh teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan sudah bertanggung jawab secara sosial dan berupaya untuk membuktikan bahwa segala aktivitas operasional yang dilakukan merupakan legitimasi dan telah mewujudkan keseimbangan antara nilai-nilai sosial dengan standar yang berlaku.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menegaskan tentang kinerja sosial dan tingkah laku perusahaan (Ghomi dan Leung, 2013). Hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* yaitu bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya tetap memberikan keuntungan dan manfaat untuk *stakeholder* karena perusahaan bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan oleh banyak pihak. Stakeholder memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan strategi perusahaan terutama dalam konteks pengungkapan lingkungan. Ghomi dan Leung (2013) menyatakan bahwa *stakeholder* dalam suatu perusahaan umumnya memiliki tujuan yang berbeda sehingga *stakeholder* berusaha untuk mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi berkaitan dengan lingkungan sosial.

Kehadiran teori *stakeholder* sebagai model paradigma semakin menambahkan keyakinan bahwa perusahaan turut adil dalam memenuhi tanggung jawab secara menyeluruh, baik kepada pemegang saham maupun *stakeholder* (Maulida dan Adam,

2011). Perusahaan dapat menerapkan kepedulian pada lingkungan secara konsisten karena perhatian perusahaan pada lingkungan merupakan poin penting dalam menjaga hubungan perusahaan dan *stakeholder* tersebut. Penerbitan laporan yang berhubungan dengan lingkungan merupakan salah satu hal yang dilakukan dengan tujuan memenuhi hak *stakeholder* dalam memahami segala informasi aktivitas suatu perusahaan yang berdampak pada lingkungannya dengan tujuan membantu keputusan investasi untuk jangka panjang. Salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Emisi karbon yang diungkapkan secara publik oleh perusahaan termasuk dalam salah satu bentuk kepedulian perusahaan pada lingkungan. Pengungkapan ini sebagai suatu informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* dengan tujuan meningkatkan kredibilitas perusahaan serta menunjukkan sikap proaktif perusahaan dalam konteks pengungkapan lingkungan.

Pengungkapan Emisi Karbon

Emisi karbon adalah proses terpisahnya berbagai macam karbon yang ada pada setiap gas menuju ke lapisan udara yang ada di bumi (Borduas dan Donahue, 2018). Emisi karbon menjadi pemicu akan terjadinya perubahan iklim sehingga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Manusia merupakan penyumbang terbesar atas karbondioksida di muka bumi yang menyebabkan bumi sulit untuk menyerap karbon sehingga jumlah karbon menjadi tidak wajar. Pengurangan pemakaian emisi karbon sebagai cara mencegah dampak yang berlebihan dalam upaya mengatasi ketidakstabilan ekonomi tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menekan emisi karbon yang tersebar di bumi melalui pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan dan pelaporan data atas emisi karbon semakin berkembang melalui tuntutan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 yang masih cenderung bersifat tidak wajib atau sukarela. Tujuan utama pengungkapan emisi karbon adalah untuk mendapatkan legitimasi atas semua aktivitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat memberikan informasi atas semua aktivitas operasinya kepada *stakeholder* terkait dengan lingkungan sehingga perusahaan memperoleh timbal balik dari *stakeholder* atas keterlibatannya dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini menggunakan *Carbon Disclosure Project (CDP)* sebagai alat ukur dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. *Carbon Disclosure Project (CDP)* ini merupakan lembaga

independen non-profit yang telah dikembangkan oleh Choi dkk. (2013) untuk memberikan informasi tentang perubahan iklim dunia.

Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan adalah metode yang mengatur maupun mengontrol suatu organisasi dalam mewujudkan nilai tambah (*value added*) bagi para *stakeholder* (Sutedi, 2012). *Corporate governance* yang positif ditandai dengan adanya tata cara dan aturan mengenai hubungan antara *shareholders*, pemangku kepentingan internal dan eksternal, pihak kreditur, dan pegawai yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka dalam melakukan pengendalian terhadap sistem perusahaan (Nasrum, 2018). Menurut IICG, *corporate governance* merupakan suatu operasi terkelola dan dilaksanakan oleh organisasi dengan tujuan menambah nilai para pemangku kepentingan terhadap kegiatan operasional organisasi tersebut.

Corporate governance memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kapabilitas perusahaan yaitu mewujudkan sistem pemilihan alternatif yang lebih optimal, mengoptimalkan nilai perusahaan, mengoptimalkan keyakinan dan kepercayaan investor, dan menaikkan nilai tambah *shareholders* serta dividen di waktu yang bersamaan (Arafat, 2008:10). Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan kebijakan yang mengatur kesinambungan antara pihak yang memutuskan dengan pihak yang memiliki otoritas akan kontrol keputusan tersebut dengan tujuan mewujudkan suatu tata kelola perusahaan yang mampu memberikan berbagai macam manfaat bagi perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dapat berupa pengaturan pihak yang memiliki sangkut paut dengan keputusan yang diambil, otoritas para *shareholder* dalam memperoleh haknya, maupun pihak kreditur dan karyawan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga dapat terbentuk suatu tata kelola perusahaan yang berkualitas dan terlepas dari konflik antar pihak terkait (Walsh dan Seward, 1990).

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan suatu kemitraan atau jalinan kerja sama terkait dengan saham yang diperoleh suatu lembaga institusi (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memberikan kontrol yang maksimal pada manajemen untuk mendorong dilakukannya pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang optimal (Akhiroh dan

Kiswanto, 2016). Peningkatan kepemilikan institusional ditandai dengan naiknya pengaruh atas kebijakan jalannya perusahaan untuk menghindari adanya sikap oportuniste (Machmud dan Djakman, 2008).

Kepemilikan institusional akan mempengaruhi peninjauan lebih lanjut atas semua aktivitas yang berkaitan dengan *stakeholder*. Teori *stakeholder* mengartikan bahwa ada ikatan yang erat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang menyebabkan keterbukaan atas segala kegiatan operasional perusahaan. Hermawan, Aisyah, Gunardi, dan Putri (2018) menjelaskan bahwa tingginya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan perusahaan sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meraih citra positif bagi *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan pengungkapan akan memberikan sinyal positif bagi para investor institusional dalam memutuskan investasi yang dilakukan.

Komite audit

Komite audit (*audit committee*) adalah kumpulan dari berbagai individu atau sekelompok dewan komisaris perusahaan klien yang melaksanakan tugas khusus serta memprioritaskan perlindungan independensi dari manajemen (Tugiman, 1995). Keberadaan komite audit terhadap pengorganisasian perusahaan sangatlah penting karena komite audit turut adil dalam mengatur pengawasan atas kemajuan perusahaan.

Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa jumlah pertemuan merupakan salah satu bukti yang memaparkan eminensi serta keunggulan utama dari komite audit. Jumlah pertemuan dilaksanakan dengan tujuan menjalankan pemeriksaan laporan dan mengawasi kegiatan *corporate governance* perusahaan ke arah yang lebih baik. Semakin berkualitas komite audit maka semakin mudah bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan *stakeholder*. Komite audit diukur dengan melihat banyaknya pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota komite audit dalam satu periode laporan tahunan perusahaan (Aniktia dan Khafid, 2015).

Kinerja lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan efisiensi yang dilakukan dengan tujuan terciptanya lingkungan yang kondusif dan mendukung (Tahu, 2019). Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan wajib menaati normal yang berlaku yaitu dengan melakukan

pengungkapan lingkungan. Pelaksanaan pengungkapan lingkungan umumnya sering dijumpai pada perusahaan yang memiliki kemampuan kerja yang unggul terhadap lingkungannya. Kemampuan kerja yang unggul terhadap lingkungannya ini memotivasi perusahaan untuk menerapkan tata cara atau pengungkapan lingkungan dengan tujuan mewujudkan hubungan positif dengan *stakeholder*.

Kinerja lingkungan diduga membawa pengaruh pada aspek lingkungan. Kinerja lingkungan yang baik memberikan efek jangka panjang bagi perusahaan terkait dengan partisipasi mengurangi dampak pergantian iklim dan pemanasan global. Pemerintah menanggapi permasalahan lingkungan di Indonesia dengan memublikasikan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER digunakan sebagai alat yang memotivasi perusahaan dalam mengembangkan pengendalian lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2018). Perusahaan akan mendapatkan *image* positif dari *stakeholder* dengan adanya penilaian PROPER. PROPER sudah menjadi salah satu alat yang wajib dilakukan dalam melakukan pengungkapan lingkungan. PROPER lingkungan bertujuan untuk melakukan kontrol atas pembenahan peraturan perundang-undangan dalam bidang penilaian dan pengukuran kinerja lingkungan. Suatu perusahaan dikatakan telah memiliki kinerja lingkungan yang kondusif dan mendukung terlihat dari warna yang diberikan pada PROPER kepada suatu usaha/kegiatan.

Pengembangan hipotesis

Kepemilikan institusional memberikan kontrol yang maksimal pada manajemen untuk mendorong dilakukannya pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang optimal (Akhiroh dan Kiswanto, 2016). Peningkatan kepemilikan institusional ditandai dengan naiknya pengarahannya atas kebijakan jalannya perusahaan untuk menghindari adanya sikap oportunistik (Machmud dan Djakman, 2008). Kepemilikan institusional akan mempengaruhi peninjauan lebih lanjut atas semua aktivitas yang berkaitan dengan *stakeholder*.

Teori *stakeholder* mengartikan bahwa ada ikatan yang erat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang menyebabkan keterbukaan atas segala kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan akan memberikan sinyal positif bagi para investor institusional dalam memutuskan investasi yang dilakukan. Chang dan Zhang (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan

pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula hak investor institusional dalam melakukan pengungkapan karbon dalam perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amaliyah dan Solikhah (2019) bahwa dengan adanya inspeksi oleh institusi suatu perusahaan akan mendorong terwujudnya pengungkapan yang berefek pada meningkatnya kepercayaan para *stakeholder* dan kestabilan saham perusahaan. Dari penjelasan tersebut akan diuji hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Komite audit adalah kumpulan dari berbagai individu atau sekelompok dewan komisaris perusahaan klien yang melaksanakan tugas khusus dan memiliki tanggung jawab dalam membantu auditor dalam melindungi independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995). Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa jumlah pertemuan merupakan salah satu bukti yang memaparkan eminensi serta keunggulan utama dari komite audit. Ahmad dan Nosakhare (2015) juga menyatakan bahwa efektivitas dan efisien informasi lingkungan ditandai dengan adanya peningkatan atas jumlah pertemuan komite audit.

Teori *stakeholder* menegaskan bahwa ada hubungan antara kinerja sosial dan tingkah laku perusahaan sehingga teori ini memiliki peran penting pada kesinambungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip *corporate governance* yaitu prinsip transparansi. Jumlah pertemuan dilaksanakan dengan tujuan menjalankan pemeriksaan laporan dan mengawasi kegiatan *corporate governance* perusahaan ke arah yang lebih baik. Semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan, semakin banyak wawasan yang didapat sehingga komite audit dapat memperkirakan keputusan yang diambil dalam rangka mengutamakan kepentingan *stakeholders* yaitu dengan melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Semakin berkualitas komite audit maka semakin mudah bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan *stakeholder*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah dan Solikhah (2019) dan Saptiwi (2019). Dari penjelasan tersebut akan diuji hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Teori legitimasi menegaskan bahwa suatu organisasi wajib menaati norma yang berlaku dengan cara mengungkapkan hasil kegiatan lingkungannya. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul dan efektif akan berupaya untuk memublikasikan kinerjanya dengan pengungkapan lingkungan (Majid dan Ghozali, 2015). Perusahaan dengan ciri khusus seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan juga memperhatikan lingkungan sehingga dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh legitimasi dari masyarakat dan menunjukkan komitmen akan menjaga lingkungan.

Anggraeni (2015) juga berpendapat bahwa kinerja lingkungan yang unggul dan efektif dapat digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat maupun perusahaan terlibat dan ikut serta dalam mengurangi perubahan iklim serta pemanasan global. Saptiwi (2019) juga mengemukakan pendapat dan hasil yang sama bahwa kemampuan kerja yang unggul terhadap lingkungannya ini memotivasi perusahaan untuk menerapkan tata cara atau pengungkapan lingkungan terkait dengan emisi karbon. Dari penjelasan tersebut akan diuji hipotesis sebagai berikut:

H3: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif yang menggunakan data sekunder dan bertujuan untuk bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan empat variabel yang meliputi satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah terdaftar di BEI pada periode 2017-2020. Sumber data laporan tahunan diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id). Sumber data peringkat PROPER didapat dari situs kementerian lingkungan hidup (www.menlhk.go.id). Analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari populasi tersebut diambil sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan tahunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, memiliki peringkat PROPER periode 2017-2020, mengungkapkan emisi karbon (meliputi minimal satu kebijakan/ item yang terkait dengan emisi karbon), dan menggunakan mata uang rupiah untuk melaporkan informasi keuangannya.

Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan emisi karbon. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, kepemilikan institusional, dan kinerja lingkungan. Pengungkapan emisi karbon (PEK) pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Carbon Disclosure Project (CDP) checklist* yang dikembangkan oleh Choi dkk. (2013) sebanyak 18 item. Jika perusahaan melakukan pengungkapan item yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka diberikan skor “1”, sedangkan bila tidak diungkapkan oleh perusahaan maka akan diberi skor “0”.

Kepemilikan institusional (KI) adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional pada penelitian ini diukur dengan cara membagi jumlah saham institusional dengan jumlah total saham yang beredar. (Chang dan Zhang, 2015). Komite audit (KA) adalah kumpulan dari berbagai individu atau sekelompok dewan komisaris perusahaan klien yang melaksanakan tugas khusus dan memiliki tanggung jawab dalam membantu auditor dalam melindungi independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995). Komite audit pada penelitian ini diukur dengan melihat jumlah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota komite audit dalam satu periode laporan tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah terbesar banyaknya pertemuan dari semua perusahaan manufaktur periode 2017-2020.

Kinerja lingkungan (KL) dapat diartikan sebagai hasil yang bisa diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang berkaitan dengan kontrol aspek-aspek lingkungan, dan pengukur kinerja lingkungan berdasarkan pada kebijakan lingkungan, target lingkungan, dan sasaran lingkungan. Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan PROPER yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang mencakup 5 (sangat baik) warna yaitu warna emas akan diberikan skor “5”, warna hijau (baik) akan diberikan skor

“4”, warna biru akan diberi skor 3 (cukup), warna merah akan diberi skor 2 (kurang baik), dan warna hitam akan diberikan skor 1 (tidak baik) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2018).

HASIL PENELITIAN

Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Total pengamatan yang digunakan adalah 4 tahun sehingga total sampel yang dipakai selama penelitian periode tahun 2017-2020 adalah 148 sampel observasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum sehingga dapat lebih mudah dipahami dan informatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon (PEK), kepemilikan institusional (KI), komite audit (KA), dan kinerja lingkungan (KL). Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

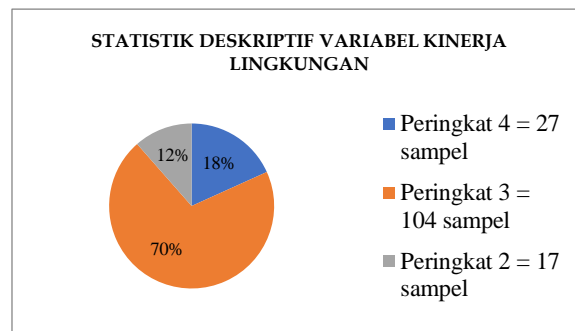
Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
PEK	0,056	0,444	0,19300	0,085941
KI	0,501	0,983	0,74040	0,141590
KA	0,500	1,000	0,61824	0,137383

Sumber data: Data diolah (2021)

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum dari masing-masing variabel. Pengungkapan emisi karbon memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari pengungkapan emisi karbon adalah 0,193. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan hanya mengungkapkan 1 sampai 6 item yang berkaitan dengan emisi karbon sesuai dengan *Carbon Emission Disclosure Checklist*. Kepemilikan institusional memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,740 yang berarti bahwa rata-rata kepemilikan institusional di perusahaan tinggi.

Komite Audit (KA) yang diukur menggunakan frekuensi rapat komite audit nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,946. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komite audit di perusahaan melakukan rapat atau pertemuan komite audit sebanyak 4 sampai 5 kali dalam setahun. Kinerja Lingkungan (KL) yang diukur menggunakan peringkat PROPER yang

diperoleh kementerian lingkungan hidup. Peringkat PROPER dari perusahaan sampel disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Statistik deskriptif variabel kinerja lingkungan

Pada gambar 4.1, peringkat 4 adalah interpretasi KL_{D1} dengan jumlah perusahaan sebanyak 27 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 18% perusahaan manufaktur telah memiliki peringkat PROPER hijau yang berarti perusahaan telah mengoptimalkan pengelolaan lingkungan lebih maksimal dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) serta melakukan tanggung jawab sosial dengan baik. Peringkat 3 adalah interpretasi KL_{D2} dengan jumlah perusahaan sebanyak 104 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 70% perusahaan manufaktur telah memiliki peringkat PROPER biru yang berarti perusahaan melaksanakan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peringkat 2 adalah interpretasi KL_{D3} dengan jumlah perusahaan sebanyak 17 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 12% perusahaan manufaktur telah memiliki peringkat PROPER merah yang berarti perusahaan telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan namun belum sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Unstandardized coefficient		t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error			
(Constant)	0,071	0,039	1,814	0,072	
KI	0,087	0,041	2,142	0,034	signifikan, positif
KA	0,103	0,042	2,453	0,015	signifikan, positif
KL _{D1}	-0,081	0,015	-5,320	0,000	signifikan, negatif
KL _{D2}	-0,040	0,019	-2,065	0,041	signifikan, negatif
KL _{D3}	0,122	0,022	5,593	0,000	signifikan, positif

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan berpengaruh pada variabel terikat yaitu pengungkapan emisi karbon. Kriterianya adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$. Pada tabel 2 telah memaparkan ringkasan data statistik hasil uji t yang menggunakan model persamaan regresi (1).

$$PEK = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \beta_3 D_1 + \beta_4 D_2 + \beta_5 D_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$PEK = 0,071 + (0,087)KI + (0,103)KA + (-0,081)D_1 + (-0,040)D_2 + (0,122)D_3 + \varepsilon$$

Variabel kepemilikan institusional (KI) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa KI memiliki pengaruh yang positif terhadap PEK yang berarti H1 yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon diterima. Variabel Komite Audit (KA) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,022 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa KA memiliki pengaruh yang positif terhadap PEK yang berarti H2 yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon diterima. Variabel Kinerja Lingkungan (KL) untuk D₁, D₂, dan D₃ menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, yang artinya KL memiliki pengaruh yang negatif terhadap PEK. Dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon ditolak.

PEMBAHASAN

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (PEK). Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amaliyah dan Solikhah (2019).

Teori *stakeholder* mengartikan bahwa ada ikatan yang erat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang menyebabkan keterbukaan atas segala kegiatan operasional perusahaan. Astari dkk. (2020) menyatakan bahwa dengan adanya kontrol melalui institusi terhadap perusahaan membuat perusahaan akan semakin terbuka dan beranggapan bahwa penerapan emisi karbon dapat meningkatkan citra positif serta

mempertahankan kepercayaan *shareholder* yang membuat penyertaan kepemilikan saham perusahaan tetap terjaga. Perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingannya sendiri melainkan juga membawa pengaruh atau manfaat pada pemegang saham serta tetap memberikan pengawasan optimal perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Pada penelitian ini, kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin meningkatkan pengawasan optimal pada perusahaan dengan tujuan akhir adalah memberikan *image* positif bagi para pemegang saham terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kepemilikan saham institusional yang dipaparkan pada laporan keuangan perusahaan akan semakin meningkatkan kualitas perusahaan bagi para investor.

Variabel komite audit (KA) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (PEK). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pertemuan yang diselenggarakan, semakin banyak wawasan yang didapat sehingga komite audit dapat memperkirakan keputusan yang diambil dalam rangka mengutamakan kepentingan *stakeholders* salah satunya terkait dengan pengungkapan lingkungan melalui emisi karbon.

Penelitian ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amaliyah dan Solikhah (2019) dan Saptiwi (2019). Teori *stakeholder* menegaskan bahwa ada hubungan antara kinerja sosial dan tingkah laku perusahaan sehingga teori ini memiliki peran penting pada kesinambungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip *corporate governance* yaitu prinsip transparansi. Transparansi berarti perusahaan terbuka pada segala kegiatan operasionalnya baik kegiatan yang berkaitan dengan keuangan maupun lingkungan.

Melalui jumlah pertemuan pada rapat komite audit, akan mendorong perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan *stakeholder*. Menurut Saptiwi (2019), perusahaan terdorong untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dikarenakan jumlah pertemuan komite audit yang meningkat tiap periode karena komite audit dapat mendukung suatu informasi yang telah teruji serta menjamin sistem pengawasan yang efektif. Amaliyah dan Solikhah (2019) juga berpendapat bahwa komite audit berperan penting dalam melaksanakan kontrol yang optimal terhadap perusahaan, sehingga

perusahaan dapat menerapkan prinsip transparansi yang ada pada GCG dalam melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit maka semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon karena kehadiran komite audit mendukung informasi yang terjamin serta menjaga sistem pengendalian perusahaan tetap beroperasi dengan baik.

Variabel kinerja lingkungan (KL) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (PEK). Koefisien negatif menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon berlawanan dimana semakin besar kinerja lingkungan suatu perusahaan maka mengakibatkan sedikitnya informasi yang dipublikasikan pada laporan suatu perusahaan tersebut.

Hasil dari penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amaliyah dan Solikhah (2019), Apriliana dkk. (2019), dan Saptiwi (2019) namun mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Musriani, Syariati, dan Hanafie (2020) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa lingkungan sosial antar perusahaan dengan masyarakat wajib menaati dan memahami nilai serta norma yang berlaku dengan cara mengungkapkan hasil kegiatan lingkungannya dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Amaliyah dan Solikhah, 2019). Menurut Abdullah dkk. (2020), Pengungkapan emisi karbon lebih ditanggapi perusahaan ketika kinerja lingkungannya dalam kondisi kurang baik karena tingginya tekanan dari sektor politik dan sosial untuk mengungkapkan emisi karbon.

Dalam penelitian ini, semakin tinggi peringkat PROPER yang diperoleh, semakin sedikit pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Sebagai contoh dari sampel penelitian, PT Indal Aluminium Industry Tbk tahun 2020 mempunyai peringkat PROPER hijau atau bisa dikatakan bahwa PT Indal Aluminium Industry telah mengoptimalkan pengelolaan lingkungan lebih maksimal dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) serta melakukan tanggung jawab sosial dengan baik dan hanya mengungkapkan 1 item dari total 18 item yang ada pada CDP yaitu mengenai total reproduksi atas emisi GRK. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang baik

semakin mendorong perusahaan untuk tidak mengungkapkan emisi gas karbon pada laporannya.

Perusahaan dengan peringkat PROPER tinggi lebih terdorong untuk mempublikasikan tanggung jawab lingkungan yang lain daripada mempublikasikan pengungkapan emisi karbonnya. Sebaliknya, semakin rendah peringkat PROPER yang diperoleh, semakin banyak pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Sebagai contoh dari sampel penelitian, Voksel Electric Tbk tahun 2017-2020 mempunyai peringkat PROPER merah atau bisa dikatakan bahwa PT Voksel Electric telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan namun belum sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan 6 item dari total 18 item yang ada pada CDP. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait emisi karbon pada laporannya jika perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan. Pengawasan terhadap perusahaan akan membuat perusahaan semakin bersedia untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Peringkat PROPER yang rendah belum mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan sehingga perusahaan membutuhkan informasi positif untuk mendorong kepercayaan investor dengan melakukan pengungkapan lingkungan melalui emisi karbon.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa serta menyelidiki pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon karena menunjukkan hasil yang signifikan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin meningkatkan pengawasan optimal pada perusahaan dengan tujuan akhir adalah memberikan *image* positif bagi para pemegang saham terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut sehingga hipotesis pertama diterima.

Variabel komite audit menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Semakin banyak pertemuan yang diselenggarakan, semakin banyak wawasan yang didapat

sehingga komite audit dapat memperkirakan keputusan yang diambil dalam rangka mengutamakan kepentingan *stakeholders*. Variabel kinerja lingkungan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan koefisien regresi menunjukkan nilai -0,087 yang berarti semakin tinggi kinerja lingkungan yang diukur melalui peringkat PROPER suatu perusahaan maka mengakibatkan sedikitnya informasi yang dipublikasikan pada laporan suatu perusahaan tersebut sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mengakibatkan lemahnya hasil penelitian yaitu: (1) Sampel penelitian berfokus pada perusahaan yang berasal dari Indonesia sehingga sampel yang digunakan tergolong sedikit dan beberapa perusahaan tidak memublikasikan emisi karbon; (2) Hasil penelitian pengungkapan emisi karbon hanya menggunakan laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dan tidak semua perusahaan memublikasikan *sustainability report* sehingga perhitungan pengungkapan emisi karbon masih terbatas; dan (3) Penggunaan PROPER dalam mengukur kinerja lingkungan dirasa kurang sesuai karena kurangnya sampel terkait peringkat PROPER dengan peringkat hitam, merah, dan emas. Dari kelemahan penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian untuk menunjukkan konsistensi perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon, baik di Indonesia maupun negara lain; (2) Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel baru seperti pertumbuhan laba, tipe industri, investasi hijau, keberagaman gender, dan nasionalitas dewan direksi; dan (3) Pengukuran kinerja lingkungan dapat menggunakan pengukuran lain di luar PROPER.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., Musriani, R., Syariati, A., dan Hanafie, H. (2020). Carbon emission disclosure in Indonesian firms: the test of media-exposure moderating effects. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10 (6), 732-741.
- Ahmad, A. C., dan Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business and Technopreneurship*, 5 (1), 99-114.
- Akhiroh, T., dan Kiswanto. (2016). The determinant of carbon emission disclosure. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 326-336.
- Amaliyah, I., dan Solikhah, B. (2019). Pengaruh kinerja lingkungan dan karakteristik corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2 (2), 129-141.
- Anggraeni, D. Y. (2015). Pengungkapan emisi gas rumah kaca, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 188-209.
- Aniktia, R., dan Khafid, M. (2015). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1-10.
- Apriliana, E., Ermaya, H. N., dan Septyan, K. (2019). Pengaruh Tipe industri, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap carbon emission disclosure. *Widyakala* , 84-95.
- Arafat, W. (2008). *How To Implement GCG Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Astari, A., Saraswati, E., dan Purwanti, L. (2020). The role of corporate governance as a moderating variable on earnings management and carbon emission disclosure. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7 (1), 69-86.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). KEP-643/BL/2012. *Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit* .
- Borduas, N., dan Donahue, N. M. (2018). *The natural atmosphere*. Didapatkan dari Green Chemistry: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809270-5.00006-6>
- Chang, K., dan Zhang, L. (2015). The effects of corporate ownership structure on environmental information disclosure—empirical evidence from unbalanced panel data in heavy-pollution industries in China. *E-ISSN: 2224-2856*, 10, 405-414.
- Choi, B. B., Lee, D., dan Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review Vol. 25 No.1* , 58-79.
- Deegan, C., Rankin, M., dan Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, 15(3), 312-343.
- Fernando, S., dan Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory, and institutional theory. *The Journal of Theoretical Accounting* , 149-178.
- Ghomi, Z. B., dan Leung, P. (2013). An empirical analysis of the determinants of greenhouse gas voluntary disclosure in Australia. *Accounting and Finance Research*, 2(1), 110-127.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gray, R., Kouhy, R., dan Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing dan Accountability Journal* , 47-77.
- Hermawan, A., Aisyah, I. S., Gunardi, A., dan Putri, W. Y. (2018). Going green: determinants of carbon emission disclosure in manufacturing companies in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(1), 55-61.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2018). *Proper*. Didapat dari Sejarah Proper: <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>, 24 Agustus 2021
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Didapatkan dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia: <https://knkg.or.id/>
- Laksani, S. A., Andesto, R., dan Kirana, D. J. (2020). Carbon emission disclosure ditinjau dari nilai perusahaan, leverage dan media exposure. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 145-164.
- Lastanti, H. S. (2004). Hubungan struktur corporate governance dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar. *Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance*.
- Machmud, N., dan Djakman, C. D. (2008). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR disclosure) pada laporan tahunan perusahaan: studi empiris pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi*, 11, 50-63.
- Majid, R. A., dan Ghozali, I. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1-11.
- Malia, I. (2020). *Paling diminati, investasi sektor manufaktur capai Rp1.348,9 triliun*. Didapat dari IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/paling-diminati-investasi-sektor-manufaktur-capai-rp13489-triliun/2>
- Marsh and McLennan Companies. (2018). *Reporting climate resilience: the challenges ahead*. Didapat dari <https://www.oliverwyman.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/reporting-climate-resilience.pdf>, 3 Agustus 2021
- Maulida, K. A., dan Adam, H. (2011). Faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability performance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* .
- Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. (2020). *Handbook of Energy dan Economy Statistics of Indonesia*. Jakarta.
- Nasrum, M. (2018). *Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. Didapatkan dari <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 61 . *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca* .
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 71. *Penyelenggaraan Investarisasi Gas Rumah Kaca Nasional* .
- Saptiwi, N. W. (2019). Pengungkapan emisi karbon: menguji peranan tipe industri, kinerja lingkungan, karakteristik perusahaan dan komite audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17 (2), 227-240.
- Suryono, H., dan Prastiwi, A. (2011). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governnce terhadap praktik pengungkapan sustainability report. *Simposium Nasional Akuntansi XIV* .
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tahu, G. P. (2019). Pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 14(1), 31-40.
- Tarjo. (2008). Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham serta cost of equity capital. *Symposium Nasional Akuntansi XI*.
- Tugiman, H. (1995). *Komite Audit*. Bandung: PT.Eresco.
- Union of Concerned Scientists. (2020, Agustus 12). *Each Country's Share of CO2 Emissions*. Didapatkan dari <https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions>
- Walsh, J. P., dan Seward, J. K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms . *Academy of Management Review* , 421-458.